



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
KE KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 6 S.D. 10 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Padang Panjang Sumatera Barat, Kota Pasuruan Jawa Timur dan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi UU dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Walikota Pasuruan (Drs. H. Syaifullah Yusuf), yang dihadiri oleh:
 - a. Wakil Walikota Pasuruan
 - b. Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pasuruan.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan,

- d. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan
 - e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan
 - f. Organisasi dan Lembaga pariwisata Kota Pasuruan
 - g. Perwakilan BBPMP Provinsi Jawa Timur
 - h. Dewan Pendidikan Kota Pasuruan,
 - i. Organisasi Pendidikan Kota Pasuruan (PGRI, IGI, FSGI)
 - j. Kwarda Gerakan Pramuka Kota Pasuruan
 - k. KONIDA Kota Pasuruan
 - l. KNPI Kota Pasuruan
 - m. Tokoh-tokoh Pendidikan, Budayawan, Seniman, Komunitas Literasi, Pelaku Pariwisata dan Komunitas Ekraf.
 - n. LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur dan PTN serta PTS di Kota Pasuruan, yaitu:
 - 1) Rektor Universitas Jember, Kampus Pasuruan
 - 2) Rektor Universitas PGRI Wiranegara
 - 3) Rektor Universitas Merdeka Pasuruan
2. Melakukan peninjauan lapangan bidang pariwisata dan pendidikan, yaitu:
- a. Taman Tematik Krampyangan yang baru *ground breaking*.
 - b. Destinasi wisata religi (Payung Madinah di Kawasan Masjid Agung Al-Anwar)
 - c. PAUD Al Kautsar
 - d. SDN 11 Purutejo
 - e. SMPN 1 Pasuruan
 - f. Universitas PGRI Wiranegara

B. Susunan Keanggotaan Tim

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 oleh Komisi X DPR RI ke Kota Pasuruan Jawa Timur dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf M. E. ST., M. Ipol. Tim Kunjungan kerja ini, didampingi oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI, dan Perpunas RI. Tim ini didampingi juga oleh staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan DPR RI.

C. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Program Indonesia Pintar (PIP).

Pelaksanaan PIP di jenjang SD dan SMP Kota Pasuruan sesuai dengan kuota dan usulan dari sekolah dengan berkoordinasi bersama operator Dapodik/operator PIP di masing-masing sekolah. Adapun jumlah SK Pemberian untuk SD, yaitu Rp1.973.475.000,00 dan jumlah SK Pemberian SMP, yaitu Rp1.488.750.000,00

- b. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Pasuruan Tahun 2023, yaitu: SD Negeri sebanyak 46 sekolah, SD Swasta sebanyak 20 sekolah, SMP Negeri sebanyak 11 sekolah, SMP Swasta sebanyak 18 sekolah, PAUD Negeri sebanyak 2 sekolah, PAUD Swasta sebanyak 207 sekolah, dan Kesetaraan sebanyak 6 PKBM. Dengan rincian alokasi dan realisasinya sebagai berikut:

Jenjang	Alokasi Bos		
	Reguler	Kinerja	Total
SD	16.022.700.000	305.000.000	16.327.700.000
SMP	10.103.500.000	330.000.000	10.433.500.000
PAUD	4.614.600.000	60.000.000	4.674.600.000
Kesetaraan	873.160.000	45.000.000	918.160.000
Total	31.613.960.000	740.000.000	32.353.960.000

Jenjang	Realisasi Bos			% serapan
	Reguler	Kinerja	Total	
SD	14.714.775.770	144.180.400	14.858.956.170	91,00 %
SMP	9.412.655.163	175.650.051	9.588.305.214	91,90 %
PAUD	4.000.000.000	60.000.000	4.060.000.000	86,85%
Kesetaraan	829.000.000	45.000.000	874.000.000	95,14%
Total	28.956.430.933	424.830.451	29.381.261.384	91,97%

Dari data di atas, serapan anggaran BOSP di Kota Pasuruan sampai dengan awal Desember 2023 yaitu Rp29.381.261.384 atau sebesar 91,97%. Dana BOSP digunakan untuk membantu operasional dari sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Di antaranya adalah untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi GTK, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan pembayaran honor.

c. Dana Alokasi Khusus.

Pelaksanaan DAK Fisik selama 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) untuk Sub Bidang SD dan Sub Bidang SMP secara umum dapat terlaksana dengan tingkat penyerapan 100% dari daftar kontrak dengan output 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Sub Bidang SD	Pagu (Rp.)	Daftar Kontrak (Rp.)
Tahun 2021	1.187.428.000	1.103.066.810
Tahun 2022	1.919.391.000	1.913.135.800
Sub Bidang SMP	Pagu (Rp.)	Daftar Kontrak (Rp.)
Tahun 2021	1.583.462.997	1.366.269.985

Tahun 2022	3.934.097.000	3.329.934.700
Tahun 2023	2.483.749.000	2.051.600.590

d. Kurikulum

Kurikulum di sekolah terdiri dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dalam penyelenggaraan Kurikulum Merdeka, sejak diterbitkannya Permendikbud terkait dengan IKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sosialisasi maupun penguatan terkait dengan IKM. Begitu juga dengan pelaksanaan evaluasi maupun rencana tindak lanjut oleh masing-masing sekolah.

e. Asesmen Nasional (AN).

Pelaksanaan Asesmen Nasional di Jenjang SD, SMP dan Paket/Kesetaraan berjalan dengan lancar tanpa adanya Pelaksanaan Ulang (PU). Pelaksanaan Asesmen Nasional juga dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah sekolah pelaksana AN, yaitu: SD berjumlah 66 Satpen (Keikutsertaan 100%), SMP berjumlah 30 Satpen (Keikutsertaan 100%), dan jumlah peserta Paket A/B/C sebanyak 3.

f. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Berikut data mengenai PPDB bagi SD/SMP Negeri di Kota Pasuruan:

Jenjang	Jml sekolah dan madrasah	Jml ruang kelas	Kuota/ daya tampung peserta didik	Zonasi (%)	Afirmasi (%)	Perpindahan tugas ortu/wali (%)	Prestasi (%)	Total (%)
SMPN	11	78	2496	50	15	5	30	100
SDN	48	123	3444	94	2	1	2	100
TKN		5	75	70	15	5	10	100

Dari data tersebut, pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan bahwa PPDB di Kota Pasuruan dilakukan secara serentak berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Walikota Pasuruan yang dilakukan secara *online*.

PPDB di Kota Pasuruan dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pertama terkait persiapan bagi Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PPDBK) dimana dalam kegiatan tersebut diperlukan adanya proses asesmen terlebih dahulu yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan secara gratis. Hasil asesmen tersebut akan diterbitkan rekomendasi bagi CPDB bersangkutan yang nantinya dapat digunakan untuk mendaftar saat PPDB berlangsung. Tahap kedua PPDB dilaksanakan dengan serentak mulai jenjang TK, SD, dan SMP Negeri se Kota Pasuruan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Walikota Pasuruan yang telah diterbitkan.

g. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Evaluasi pelaksanaan Layanan Khusus terutama untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) berjalan dengan optimal. Namun terkendala dengan kurangnya tenaga yang dikhususkan dalam penanganan PDPD. Kota Pasuruan sendiri memiliki 32 ASN yang berstatus sebagai Guru Inklusi (GI) yang tersebar di beberapa sekolah di Kota Pasuruan mulai TK, SD dan SMP. Dalam Peraturan Walikota Pasuruan No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi disebutkan bahwa sekolah dapat menerima PDPD dengan kuota maksimal 2 siswa per rombongan di masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan juga telah menyediakan akomodasi yang layak bagi PDPD seperti pelaksanaan Asesmen yang dilakukan secara gratis, sarana transportasi yang digunakan untuk antar jemput PDPD yang kurang mampu secara GRATIS, ketersediaan ruang sumber sebagai ruang pembelajaran khusus bagi PDPD di satuan pendidikan dan sarana prasarana lainnya yang memang diperuntukkan bagi PDPD dalam memperoleh pendidikan. Terkait ini, jumlah siswa pada Sekolah Dasar di TA. 2023/2024 sebanyak 2.697. Sementara peserta didik jumlah siswa pada PDPD TA. 2023/2024, yaitu 554 Peserta Didik.

Mengenai pendidikan khusus, guru ASN Pendidikan Khusus (Guru Inklusi) di Kota Pasuruan sebanyak 32 guru yang tersebar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

h. Bantuan Perangkat TIK.

Mengenai hal ini, sampai dengan tahun 2023 hampir semua SD dan SMP di Kota Pasuruan telah melaksanakan Asesmen Nasional secara mandiri dengan menggunakan perangkat TIK bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Adapun data sekolah penerima bantuan TIK, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah lembaga	Keterangan (Sumber)
2021	1 Lembaga SMP Swasta	Kemendikbudristek
2022	4 Lembaga SMP Swasta	Kemendikbudristek
2021	3 Lembaga SD Negeri	DAK
2022	14 Lembaga SD Swasta	DAK
2022	3 Lembaga SMP Swasta	DAK
2023	1 Lembaga SMP Swasta	DAK

i. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.

Terkait hal ini, disebutkan oleh Pemda Kota Pasuruan bahwa pada program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), peserta didik diberi rintisan usaha berupa bantuan peralatan dan bahan baku sesuai dengan jenis keterampilannya. Selanjutnya LKP memberikan pendampingan

terhadap peserta didik untuk mengurus/mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), akses perbankan dan melibatkan Dinkop untuk mendapatkan pembinaan lanjutan sebagai wirausaha pemula, serta berharap Dinkop memperhatikan peserta didik apabila terdapat *event-event*. Sementara pada program PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja) diwajibkan mengadakan uji kompetensi sesuai bidang yang diajarkan, karena ada penempatan kerja/magang. Uji Kompetensi dilakukan di TUK (Tempat Uji Kompetensi) dari LSK (Lembaga Sertifikat Komputer) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

j. Pelaksanaan rekrutmen guru ASN PPPK.

Kebutuhan ASN PPPK teknis di sekolah sangat dibutuhkan sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) dalam menunjang kinerja pemerintahan dalam bidang pendidikan di lingkungan sekolah, seperti tenaga administrasi (pranata komputer), tenaga perpustakaan (Pustakawan), pelaksana kebersihan dan penjaga sekolah sehingga tenaga honorer sekolah mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN PPPK, yang nantinya secara langsung berdampak pada penuntasan tenaga honorer sekolah yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Dan bagi tenaga honorer yang sudah berusia 35 tahun ke atas diangkat sebagai ASN PPPK Teknis tanpa melalui tes.

k. Kebijakan Merdeka Belajar.

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan program turunannya seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak di Kota Pasuruan sangat membantu sekolah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dengan adanya sekolah penggerak, guru lebih paham dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, mengembangkan Proyek Penguatan Profil Pancasila melalui analisis lingkungan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyusun KOSP, membentuk komunitas belajar dan sebagainya. Sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter). Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Pada tahun pertama Program Sekolah Penggerak diaplikasikan pada internal sekolah penggerak sendiri, selanjutnya melalui kegiatan Gugus Sekolah pada sekolah lainnya. Sekolah penggerak juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

l. Kurikulum Merdeka.

Pemerintah Kota Pasuruan mendukung rencana penerapan kurikulum merdeka secara nasional pada tahun 2024. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Pasuruan telah menyusun Rencana Anggaran tahun 2024 yang mendukung Kurikulum Merdeka sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TP2KS);
- 2) Fasilitasi Penguatan Kurikulum Merdeka mulai dari optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar hingga Sosialisasi terkait miskonsepsi implementasi kurikulum Merdeka yang terjadi;
- 3) *Workshop* Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
- 4) Kerjasama dengan Mitra Pembangunan dalam hal pencegahan perundungan dan 6 dosa besar pendidikan;
- 5) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Komitmen Implementasi Merdeka Belajar.

2. Bidang Pendidikan Tinggi

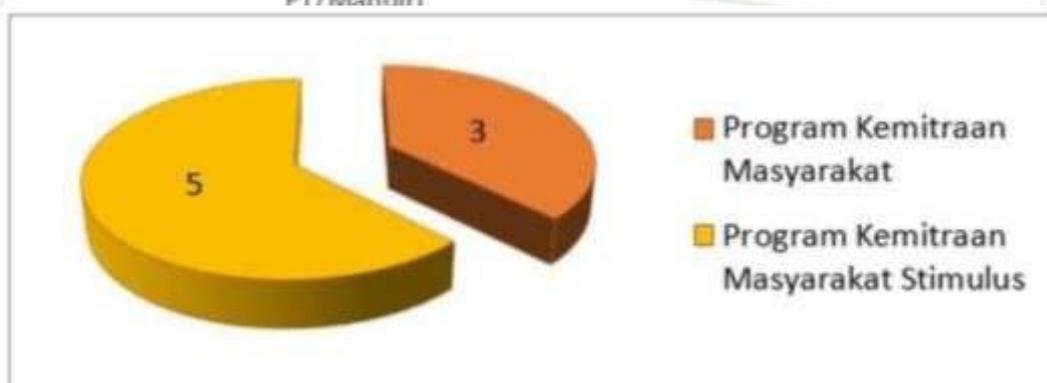
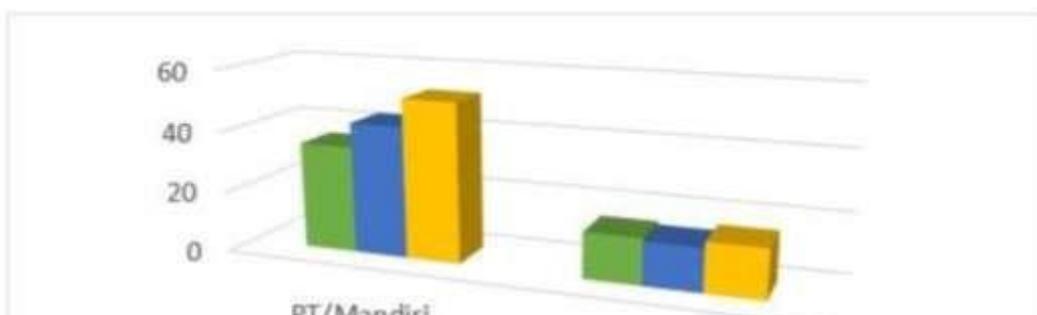
a. Universitas Merdeka Pasuruan menyampaikan data dan pandangannya melalui jawaban tertulis sebagai berikut:

- 1) Universitas Merdeka Pasuruan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Program Kerja Sama (PKS) dalam berbagai bidang. Kolaborasi antara pemerintah setempat dengan perguruan tinggi sangat diperlukan. Program-program pembelajaran, khususnya di luar kampus (KKN tematik, magang kerja, praktik kerja, dan sejenisnya) menyesuaikan dengan program-program pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat dukungan penuh dari pemerintah. Sebaliknya perguruan tinggi juga memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam hal pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Evaluasi program di perguruan tinggi dilakukan setiap semester sesuai dengan regulasi dan perguruan tinggi memiliki pedoman Sistem Penjaminan Mutu yang disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, para dosen dipantau melalui pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD), khusus di wilayah Jawa Timur, LLDIKTI VII akan melakukan verifikasi dan pembinaan bahkan pemberian sanksi jika ditemui pelanggaran.
- 3) Program-program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten, kreatif dan mandiri.
- 4) Universitas Merdeka Pasuruan sudah melaksanakan program pembelajaran kolaborasi dengan DUDI. Kerjasama dijalin dengan tujuan mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja agar mempunyai kompetensi tambahan, di samping kompetensi sesuai bidang ilmunya. Salah satu implementasi kolaborasi tersebut adalah mengikutsertakan mahasiswa dalam program Wirausaha Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (tahun 2022 dan 2023).

- b. Universitas PGRI Wiranegara melalui jawaban tertulis menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Universitas PGRI Wiranegara Nomor 130.4/03/423.013/2022 dan 1211/UNIWARA/KS/2022 meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lain; seperti penyediaan tempat PKL/PLP/Magang, tempat penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa dan penelitian yang dilakukan oleh dosen, obyek pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, narasumber/juri/dll di kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Berikut disajikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen;

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	33	30	28	91
2	Jurnal nasional terakreditasi	26	20	13	59
3	Jurnal internasional	4	8	8	20
4	Jurnal internasional bereputasi	1	1	2	4
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi	0	34	0	34
6	Seminar nasional	2	8	8	18
7	Seminar internasional	0	9	5	14
8	Tulisan di media massa nasional	0	0	0	0
9	Tulisan di media massa internasional	0	0	0	0
10	Buku Referensi/Monograf	12	15	4	31
11	IPR	0	0	4	4
Jumlah		78	125	72	275



Sementara itu, mahasiswa melakukan penelitian untuk skripsi mereka dan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat seperti KKN, PKM, PPK Omawa, P2MW dan lain-lain.

Terdapat tiga status kepegawaian dosen Universitas PGRI Wiranegara : (1) dosen PNS DPK yaitu dosen berstatus ASN ditugaskan di Universitas PGRI Wiranegara 5 orang yang tersebar di beberapa program studi, (2) dosen tetap yayasan, yaitu dosen yang menerima SK sebagai dosen tetap, sejumlah 56 orang, (3) dosen luar biasa, yaitu dosen yang tidak terikat dan hanya mengajar di program studi yang membutuhkan. Jumlah tenaga kependidikan yang tersebar di BAU ataupun BAAK adalah 22 orang.

Sebanyak 17 dari 65 dosen belum memiliki jabatan akademik, 19 dosen berpangkat asisten ahli, 26 orang lektor dan 3 orang lektor kepala. Dengan adanya Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2023; dimana terdapat penyederhanaan standar, Universitas PGRI Wiranegara belum memenuhi hal tersebut, dikarenakan penjelasan dari Permendikbudristek tersebut belum ada.

Universitas PGRI Wiranegara telah memperoleh akreditasi B. Sedangkan di lingkup program studi, 6 program studi memperoleh akreditasi B, 4 program studi memperoleh akreditasi Baik, dan 3 program studi memperoleh status terakreditasi.

Metode evaluasi Program KIP Kuliah di Universitas PGRI Wiranegara dilakukan dengan pengujian 5 Indikator Kinerja Utama yang meliputi 5 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Penggunaan dan Tepat Prosedur). Pertama, Tepat Sasaran adalah memastikan penerima bantuan adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kedua, Tepat Jumlah adalah memastikan jumlah bantuan yang diterima mahasiswa telah sesuai ketentuan. Ketiga, Tepat Waktu adalah memastikan kesesuaian waktu pemberian bantuan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan. Keempat, Tepat Penggunaan adalah memastikan penggunaan bantuan oleh mahasiswa telah sesuai dengan juknis. Kelima, Tepat Prosedur adalah memastikan mahasiswa penerima bantuan telah memenuhi ketaatan prosedur sesuai juknis. Harapan kami, terdapat atensi peningkatan jumlah kuota penerima KIP Kuliah di Universitas PGRI Wiranegara mengingat calon mahasiswa baru yang berprestasi tetapi terkedala biaya pendidikan.

Universitas PGRI Wiranegara masih berupaya meningkatkan kualitas kelayakan gedung, laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya, tetapi belum memiliki perpustakaan pusat yang memadai. Pihak kampus berharap ke depan dapat merealisasikan gedung perpustakaan yang lebih memadai, meski saat ini mahasiswa dapat memperoleh akses

perpustakaan *online*. Fasilitas lain yang belum dimiliki adalah lapangan basket, futsal dan lainnya, sementara lapangan voli masih kurang maksimal.

Pemanfaatan teknologi masih akan ditingkatkan karena belum semua titik memiliki akses internet. Universitas PGRI Wiranegara telah mengimplementasikan kebijakan MBKM, terlihat dari adanya (1) pedoman teknis implementasi program MBKM, (2) kurikulum semua prodi telah mengakomodasi pemberian kesempatan 1 semester menempuh pembelajaran di luar program studi setara dengan 20 sks, (3) aplikasi *wiraMerdeka* yang membantu dalam hal administrasi di dalam kampus; (4) Ratusan mahasiswa telah melakukan program BKP MBKM baik melalui *flagship* dan puluhan dosen untuk beberapa kali juga terlibat sebagai dosen pendamping pada program tersebut; (5) Universitas PGRI Wiranegara menyelenggarakan BKP MBKM secara mandiri; (6) Universitas PGRI Wiranegara telah mendapatkan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) 3 tahun secara berturut-turut, KSKI MBKM untuk 4 program studi di tahun 2021 dan sebagainya. MBKM memberi semangat baru bagi mahasiswa untuk meningkatkan diversifikasi keilmuannya.

Universitas PGRI Wiranegara sudah melakukan perencanaan yang cukup baik untuk bermitra dengan DUDI, hal ini terlihat dari kurikulum serta visi misi Universitas PGRI Wiranegara yang melibatkan DUDI dalam merencangkannya serta 38 matakuliah selama dua tahun telah diperoleh Uniwara.

- c. Universitas Jember Kampus Pasuruan Prodi Keperawatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.
- 1) Pemerintah Kota Pasuruan mendukung Prodi D3 Keperawatan sejak awal berdirinya berbentuk Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), kemudian beralih Akademi Keperawatan (Akper) hingga proses menjadi Universitas Jember.
 - 2) Kenaikan pangkat dan fungsional dosen masih dalam proses mengingat semua dosen Akper dan tenaga kependidikan beralih status dari Pegawai Pemkot Pasuruan menjadi Pegawai UNEJ di lingkungan Kemendikbudrsitekdikti. Adapun akreditasi prodi D3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan adalah B.
 - 3) Beasiswa KIP kuliah sangat berdampak bagi peningkatan akses dan partisipasi mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah. Para lulusan prodi ini dibutuhkan oleh masyarakat, terlihat dari hasil *tracer study*, tidak lebih dari empat bulan mereka terserap dunia kerja.
 - 4) Kondisi fisik sarana prasarana pendidikan 90% memadai, kekurangan dipenuhi dengan praktik lapangan di RS di luar kampus.

3. Bidang Kebudayaan

Upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam memajukan kebudayaan antara lain:

- a. Menyelenggarakan *event* yang bertemakan seni budaya, antara lain: Pameran Seni Budaya, *Folklor in harmoni* (sebuah wadah untuk memfasilitasi tampilan tim kesenian) Karnaval Seni Budaya Siswa, Pawai Mobil Hias dengan peserta setiap kelurahan yang menampilkan ikon masing-masing kelurahan, Pawai Budaya Apeksi, Pasuruan *street art carnival*, Pawai *ta'aruf* dalam rangka MTQ, Pekan Kebudayaan Daerah, Wayang Kulit Cilik, Festival Ishari,
- b. Melestarikan tradisi kearifan lokal melalui bari'an hari jadi kota Pasuruan, Fasilitas haul.
- c. Menyelenggarakan lomba-lomba dengan materi budaya lokal antara lain: kolaborasi musik tradisional (lesung dan tari paravan), lomba tradisi dolanan rakyat, lomba al banjari, lomba samroh, Pasuruan Harmoni *Choir Competition*,
- d. Memberi pembinaan pencak kuntu mancilan dan Tari kepada guru dan siswa SMP Negeri/Swasta se-Kota Pasuruan, pembinaan musik ansambel gitar dan paduan suara.

Proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pasuruan adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kota Pasuruan berupaya menghimpun data terkait obyek pemajuan kebudayaan lokal;
- b. Mengumpulkan informasi terkait OPK yang telah dihimpun kepada pelaku seni, budayawan dan sejarawan lokal;
- c. Merumuskan program dan kegiatan dalam upaya melindungi mengembangkan dan memanfaatkan OPK;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan melibatkan pelaku seni, budayawan dan sejarawan.

Berikut merupakan upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan inventarisasi pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu membangun Rudal Sidaya, melakukan wisata edukasi, sosialisasi sarasehan, mengirimkan delegasi tim kesenian ke Sumenep dan TMII, Jakarta. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan OPK.

Peran swasta dan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan strategi pembangunan bidang kebudayaan di Kota Pasuruan adalah dengan partisipasi pada kegiatan-kegiatan bertema kebudayaan. Dukungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pemajuan kebudayaan di Kota Pasuruan yaitu berupa dana, fasilitas pelestarian seni budaya dan

pemikiran berupa konsep program kegiatan untuk pengembangan dan kemajuan seni budaya. Pihak yang mendukung dan berperan serta yaitu: Dewan Kesenian Kota Pasuruan, Budayawan, Sejarawan, Pegiat Budaya, Pelaku Seni Budaya.

Pandangan mengenai hasil kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 23-27 Oktober 2023: KKI 2023 menghasilkan 10 gagasan, dan Pemkot Pasuruan menyepakati dan mendukung serta berupaya menyesuaikan program kegiatan kebudayaan di Kota Pasuruan dan melaksanakan amanat sesuai gagasan hasil KKI 2023 tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara rutin melakukan koordinasi untuk pemajuan 10 objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota, mensosialisasikan dan mengadakan percepatan penginputan pada aplikasi Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD).

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk bidang kebudayaan di Kota Pasuruan selama tiga tahun terakhir:

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	706.101.845	648.708.350
2022	3.024.529.963	2.546.821.149
2023	4.089.407.644	1.788.552.972 (triwulan III)

Pemerintah Kota Pasuruan merasa perlu RUU tentang Bahasa Daerah karena bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebhinekaan yang dimiliki NKRI. Substansi yang perlu dimasukkan dalam melakukan revisi UU yaitu: terkait tata cara penggunaan bahasa daerah di masyarakat, dorongan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan program kegiatan yang mendukung pelestarian penggunaan bahasa daerah.

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Pasuruan berusaha menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor pendukung percepatan kemajuan ekonomi. Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga melaksanakan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pembangunan beberapa daya tarik wisata di antaranya Wisata Payung Hidrolik pada Kawasan Wisata Religi Terintegrasi, pembangunan daya tarik wisata Kampung Tematik Mebel Bukir dan revitalisasi daya tarik wisata *Water Tower*. Hal lain yang dilakukan adalah pengembangan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu pelatihan tata kelola destinasi, pelatihan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata pelatihan *homestay*, pelatihan pemandu ekowisata, pelatihan pemandu wisata buatan, pelatihan pemandu wisata budaya, pelatihan pemasaran digital, pelatihan pengelolaan desa wisata, Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata, dengan sasaran pelatihan dari kelompok sadar wisata, biro perjalanan, HPI,

UMKM, industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan pemandu pada TIC. Selain pelatihan juga terdapat pendampingan oleh praktisi dan akademisi kepariwisataan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan upaya yang dilakukan, geliat dan jumlah wisatawan meningkat. Semakin banyak *event-event* pariwisata yang diikuti ataupun diselenggarakan oleh masyarakat pada dua tahun terakhir. Masyarakat juga mulai mengembangkan potensi-potensi kampung wisata yang dimilikinya di antaranya yaitu kampung wisata religi Kebonsari, Kampung Lansia Tanggung Purworejo, Kampung *Heritage* Karanganyar, Kampung Mangrove Tambaan, Kampung Tematik Mebel Bukir, Kampung Jelak Blandongan, Kampung *Heerenstraat* Pekuncen dan beberapa kampung lainnya. Pengembangan pariwisata ini membuktikan bahwa dukungan Pemerintah Kota Pasuruan telah disambut dan dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kawasan dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berikut merupakan langkah yang ditempuh untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif setelah Covid-19:

- a. Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif agar memiliki daya saing dalam pengembangan industri pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berbasis digital dengan melakukan pelatihan dan pendampingan digitalisasi produk wisata dan ekonomi kreatif. Dengan digitalisasi produk ini diharapkan perluasan pasar yang dapat dijangkau oleh pelaku Parekraf dapat terwujud di era pandemi Covid-19.
- b. Penyelenggaraan *event-event* promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas juga terus didukung untuk mendatangkan kunjungan wisman dan wisnus yang lebih banyak. Dimana *event-event* yang dilakukan tetap memberlakukan protokol Covid-19 yang ketat.
- c. Pembangunan daya tarik wisata baru serta infrastruktur pendukungnya terus dilakukan, di antaranya dengan pembangunan kawasan wisata religi terintegrasi, revitalisasi kawasan *heerenstraat* atau *heritage*, pembangunan kawasan kampung tematik, dan pembangunan daya tarik wisata mebel. Dengan pembangunan daya tarik wisata baru ini diharapkan dapat memberikan pilihan dan pesona wisata yang baru di era pandemi sehingga dapat lebih banyak mengundang wisatawan untuk datang ke Kota Pasuruan.
- d. Pembuatan media pemasaran pariwisata digital melalui pembuatan *website* dan aplikasi *mobile* sebagai salah satu media untuk memasarkan produk wisata dan ekonomi kreatif di Kota Pasuruan serta gencar melakukan promosi digital melalui instagram dan youtube untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan.

Dalam hal implementasi Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun pemetaan potensi ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti dengan penyusunan *Roadmap* Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2023—2028. *Roadmap* yang sudah disusun ini dihasilkan melalui *focus group discussion* yang telah dilaksanakan oleh Komite Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan berdasarkan masing-masing potensi sub sektor ekonomi kreatif yang dimiliki oleh pelaku Ekraf di Kota Pasuruan. Untuk fasilitasi berikutnya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi *Roadmap* selama 5 tahun ke depan dengan tetap mengacu pada UU No. 24 Tahun 2019.

Harapan pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu menciptakan peluang bisnis dan terciptanya lapangan kerja baru dan terwujudnya pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Selain itu juga menyediakan bantuan pendanaan bagi pendampingan pengembangan pariwisata oleh praktisi ataupun akademisi kepariwisataan dan ekonomi kreatif agar daerah-daerah rintisan pariwisata lebih terarah dalam pengembangan pariwisatanya. Sementara itu, untuk pengembangan ekonomi kreatif diharapkan terdapat bantuan bagi fasilitasi HAKI untuk pelaku ekonomi kreatif di daerah.

5. Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan

- a. Beberapa atlet Kota Pasuruan sudah masuk dalam Puslatda Jatim, yaitu: Cabor Sambo 2 atlet, Cabor Muaythai 2 atlet, Cabor Hocky 2 atlet, Cabor Tae Kwon Do 1 atlet, Cabor Selam 1 atlet.
- b. Upaya Kemenpora RI dalam menyosialisasikan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah dengan mengundang lembaga baik pemerintah maupun swasta yang mendukung keolahragaan. DISPARPORA Kota Pasuruan akan merencanakan penyelenggaraan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam bentuk Rapat Koordinasi (RAKOR) Keolahragaan, yang hasilnya akan dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Renstra Kepala Daerah tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Daerah, dengan mempertimbangkan cabang olahraga unggulan dan yang bisa membangkitkan industri keolahragaan.

6. Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Kota Pasuruan diupayakan untuk terus lebih baik. Tahun 2018, Perpustakaan Umum Kota Pasuruan berpindah lokasi dari Taman Kota dengan luas 39m² ke lokasi baru di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Sekargadung dengan luas bangunan mencapai 1.650 m² dan menempati alokasi lahan seluas 10.249 m², berdampingan dengan Taman Sekargadung. Jumlah koleksi pustaka hingga akhir tahun 2022 mencapai 28.838 eksemplar dengan 12.640 judul

yang ditata sesuai katalog, serta koleksi pustaka khusus buku Braille dengan jumlah mencapai 200 eksemplar dengan 28 judul serta jumlah e-book sejumlah 629 e-book dengan 392 judul yang dikemas dalam aplikasi PODI (*Pasuruan Book of Digital*).

Tanggal 2 Januari 2023, Perpustakaan Umum Kota Pasuruan mendapatkan Akreditasi B dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terhitung tanggal 15 Mei 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan mendapatkan hak akses sebagai admin penerbitan ISBN dari Perpustakaan untuk hasil karya penulis. Dinas juga menempatkan bahan pustaka berupa Pojok Baca di Mall Pelayanan Publik. Jumlah pegawai yang menangani Perpustakaan (November 2023) sebanyak 14 orang dengan rincian: Pustakawan 8 orang (5 PNS dan 3 PPPK), Tenaga Teknis/Pengelola Pustaka 4 orang dan Tenaga TIK 2 orang. Terkait kesejahteraan Pustakawan, terdapat tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Terkait kemajuan perpustakaan digital, Pemerintah Kota Pasuruan mengusulkan mengenai penyediaan bahan pustaka yang mengakomodasi kebutuhan pemustaka dan kemudahan akses perpustakaan digital bagi publik dengan perangkat dan jaringan internet gratis dan aman, serta penyediaan Titik Baca, Pojok Baca Digital di tiap Kelurahan dan Ruang Publik.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Pasuruan belum optimal. Sebelum pandemi Covid-19, pernah dilakukan sejumlah kegiatan: pelatihan memasak, fasilitasi komunitas Bahasa Inggris, fasilitasi komunitas olahraga (panahan), fasilitasi komunitas pecinta sejarah serta pecinta reptil. Guna pemenuhan sarana yang ramah atas disabilitas sensorik netra, tahun 2022 dipasang *tactile tile* pada lantai Gedung Perpustakaan Umum Kota Pasuruan selain Petugas Khusus disabilitas. Kolaborasi dengan Kader PKK Kelurahan dengan kegiatan pelatihan kerajinan tangan dan memasak. Untuk menambah koleksi pustaka visual, juga disediakan sarana *display* karya siswa TK-SMA untuk memfasilitasi pemustaka.

Koleksi Pustaka idealnya bertambah 5% dari tahun sebelumnya, tetapi sejak tahun 2020 koleksi belum bertambah signifikan, penambahan berasal dari hibah dari masyarakat. Koleksi naskah kuno/sejarah yang dimiliki baru berupa dokumen pemerintahan yang diperoleh dari penyerahan dokumen pada Bagian Hukum yang dikelola oleh Bidang Kearsipan. Tahun 2023 ini, telah diterbitkan buku "Jejak Sejarah Kota Pasuruan", yang merupakan kontribusi pemerhati sejarah di Kota Pasuruan dan hasil penulisan naskah artikel sejarah dari masyarakat. Terkait perpustakaan khusus, terdapat Perpustakaan Khusus P3GI dengan koleksi berupa buku dan jurnal hasil penelitian industri gula sejak tahun 1885 hingga 2002. Pengelolaan koleksi baru setelah masa kemerdekaan cukup

terawat baik, namun untuk koleksi saat masa penjajahan Belanda perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik.

Kondisi literasi di Kota Pasuruan tahun 2022 dari hasil penilaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebesar 67 (kategori Tinggi), dan adapun upaya peningkatan literasi yang dilaksanakan adalah tetap melaksanakan Perpustakaan Keliling terjadwal ke sekolah-sekolah, tempat fasilitas umum serta pada even-even tertentu. Juga diupayakan ada evaluasi dan monitoring pengelolaan perpustakaan dengan Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah serta Perpustakaan Kelurahan, selain itu dilaksanakan lomba-lomba literasi bagi masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menangani masalah layanan perpustakaan adalah dengan menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di sekitar dengan *silang layan* koleksi pustaka, dan ke depan akan melaksanakan kerjasama yang lebih luas dengan institusi akademik guna studi tiru maupun pinjam koleksi. Untuk mengatasi campur aduknya koleksi referensi dengan koleksi umum, dilaksanakan *stock opname* dimana melakukan *serving* (penjajaran koleksi) yang lebih sering.

Jumlah pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kota Pasuruan sebanyak 8 orang dan sudah mencukupi. Adapun kebutuhan pustakawan di sekolah sejumlah 154 orang, yaitu SD/MI sejumlah 91 orang, SMP/MTs sejumlah 40 orang serta SMA/SMK/MA sejumlah 23 orang. Tahun 2023 ini telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Sekolah Dasar yang diselenggarakan dari kerjasama BKD Kota Pasuruan-BPSDM Jatim sejumlah 30 orang.

Di Kota Pasuruan akan dilakukan *pilot project* perpustakaan berbasis inklusi sosial pada tahun 2024 di Kelurahan Petamanan dan Kelurahan Sekargadung yang melibatkan PKK Kota dan PKK Kelurahan, dengan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi). Berfokus pada pemanfaatan tanaman obat keluarga dan tanaman bermanfaat lainnya, untuk diolah menjadi makanan ringan, minuman maupun diversifikasi pangan lainnya.

D. Permasalahan dan Temuan

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan terdapat permasalahan dan temuan pokok yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK di Kota Pasuruan secara keseluruhan belum menuntaskan guru honorer (GTT) yang ada di masing-masing sekolah dan belum memenuhi kebutuhan guru di sekolah pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, karena beberapa hal yaitu:
 - a. masih terdapat sebagian guru honorer sekolah negeri (GTT) yang mengabdikan di atas 16 tahun merasa keberatan ikut ujian CAT, banyak

- mereka yang kalah bersaing dengan *fresh graduate* atau pelamar dari sekolah swasta dan pelamar dari lulusan program pendidikan profesi guru; mereka berharap bisa langsung diangkat sebagai guru ASN PPPK. Perlu regulasi atau skema agar guru-guru yang berasal dari sekolah swasta yang lulus PPPK tidak diberhentikan dari yayasan sampai ada penetapan NIP dan penempatan di sekolah;
- b. perlu adanya penambahan alokasi formasi pendidikan khusus (Guru Inklusi) dan guru Bahasa Inggris di SD (sesuai penerapan kurikulum merdeka) dan diharapkan tidak ada perubahan menjadi formasi guru kelas saat guru pendidikan khusus dan guru Bahasa Inggris berada di sekolah reguler;
 - c. diperlukan kebijakan atau regulasi untuk mengutamakan pelamar dari guru yang berasal dari pemerintah kota sendiri baik dari sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar pada dapodik sehingga mereka memiliki kesempatan luas untuk menjadi ASN PPPK di daerahnya sendiri;
 - d. optimalisasi bagi pelamar guru ASN PPPK yang lulus ambang batas bisa ditempatkan di daerahnya sendiri jika secara perbandingan kalah dan tidak bisa menempati formasi kebutuhan PPPK yang ada;
 - e. guru yang lulus *passing grade* formasi tahun 2021 (P1) untuk Kota Pasuruan mohon bisa dituntaskan pada tahun ini pada alokasi formasi guru ASN PPPK tahun 2023 sesuai dengan formasi yang dilamar serta untuk penempatannya dilakukan oleh dinas berdasarkan kebutuhan guru yang ada di masing-masing sekolah;
 - f. Optimalisasi P1 guru ASN PPPK dari luar daerah pada formasi tahun 2022 menyebabkan kelebihan guru di sekolah yang terdampak penempatan P1. Mohon kiranya ada regulasi yang jelas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk penataan guru ASN PPPK.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan dalam proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan OPK adalah: (1) keterbatasan anggaran, (2) belum ada sistem informasi terpadu data seni dan budaya, (3) kurangnya penerus atau pelestari pelaku budaya lokal, (4) kurangnya minat masyarakat terhadap seni dan budaya.
 3. Masalah bidang kepemudaan di Kota Pasuruan antara lain; (1) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah; (2) kurangnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dikarenakan sikap apatisisme massal yang dialami pemuda; (3) persoalan kepemudaan yang terkait dengan peran sosial masih memerlukan perhatian; (4) minimnya sarana dan prasarana kepemudaan; dan (5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. Sementara itu, masalah di bidang kepramukaan adalah tidak adanya bumi perkemahan yang dimiliki Kwarda Kota Pasuruan dan ketidakpastian Kepengurusan Kwarda Jatim sehingga berimbas kepada keorganisasian dan program kerja kwarda.

4. Permasalahan dalam keolahragaan yang sering muncul di antaranya adalah kurangnya ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam menjalankan program kegiatan yang mendukung keolahragaan.
5. Beberapa masalah yang muncul dalam layanan perpustakaan di Kota Pasuruan antara lain: masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, terbatasnya bahan pustaka baik dari jumlah koleksi maupun judul yang hanya 12% dari jumlah penduduk, gangguan akses ke jaringan Perpustakaan Nasional, keterbatasan jumlah komputer beserta sarananya bagi pengunjung untuk mengakses informasi secara daring, serta keterbatasan area baca yang lebih representatif. Selain hal tersebut di atas, saat ini masih terdapat kesamaan pelabelan koleksi referensi dengan koleksi umum pada Klas Rak buku, sehingga sering menyulitkan pencarian oleh Pemustaka.

E. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan terdapat masukan serta aspirasi dari para pemangku kepentingan di Kota Pasuruan, antara lain:

1. Pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk pembangunan Taman Tematik Krampyangan. Taman ini diarahkan juga sebagai destinasi wisata Kota Pasuruan yang dapat menopang wisata religi, dimana Walikota Pasuruan ingin menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota manasik haji terbesar di Indonesia. Selain itu, pengembangan wisata religi menjadi potensial dengan adanya makam Mbah Yai Hamid yang selalu dipenuhi para peziarah setiap bulan-bulan tertentu.
2. Permohonan dukungan untuk pembangunan dan pengembangan destinasi wisata sejarah dan budaya. Mengingat Kota Pasuruan merupakan kota pelabuhan dan niaga terbesar pada tahun 1700-an dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembikar serta dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa bangunan-bangunan kuno di berbagai sudut kota yang usianya lebih tua dari bangunan-bangunan di Surabaya.
3. Usulan Pemerintah Kota Pasuruan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dalam rangka pemajuan kebudayaan: memberikan wadah yang lebih banyak kepada seniman lokal untuk bisa menampilkan karyanya dalam tingkat regional dan nasional.
4. Mengenai Revisi UU Kepariwisata, Pemerintah Kota Pasuruan mengusulkan substansi yang perlu dimasukkan dalam revisi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di antaranya adalah (1) pengaturan mengenai konsep hexa helix dalam pengembangan pariwisata, sebagai upaya penguatan kolaborasi pariwisata agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan, (2) pengaturan konsep pariwisata berkelanjutan bagi daerah-daerah rintisan pariwisata sesuai dengan potensi wisatanya.
5. Mengenai seleksi ASN PPPK, terdapat beberapa aspirasi yaitu (a) harapan agar guru honorer yang mengabdikan belasan tahun diangkat menjadi ASN

- PPPK, (b) skema agar guru dari sekolah swasta yang lulus PPPK tidak diberhentikan sampai penetapan NIP dan penempatan sekolah, (c) penambahan formasi pendidikan khusus dan guru Bahasa Inggris di SD, (d) pelamar guru dari kota asal dan terdaftar di dapodik agar diutamakan, (e) optimalisasi pelamar guru ASN PPPK yang lulus ambang batas agar ditempatkan di daerahnya sendiri, (f) penempatan oleh dinas berdasarkan kebutuhan guru di masing-masing sekolah, (g) regulasi yang jelas mengenai penataan formasi karena terdapat sekolah kelebihan guru.
6. Pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan usulan dalam penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional oleh Kemenpora RI, antara lain:
 - a. perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Kemenpora dengan *stakeholder* kepemudaan;
 - b. pentingnya peningkatan pemahaman dan implementasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan alat ukur keberhasilan pelayanan kepemudaan;
 - c. sering diadakannya peningkatan kajian, advokasi kebijakan dan perlindungan pemuda;
 - d. mendukung percepatan penyusunan rencana aksi daerah kepemudaan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik pusat maupun daerah.
 7. Universitas PGRI Wiranegara mengusulkan pembangunan *student centre* sebagai media mahasiswa untuk melaksanakan dan mengembangkan aktivitasnya.

F. Pembahasan

Selama kunjungan kerja ke Kota Pasuruan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Walikota Pasuruan dan jajaran serta para pemangku kepentingan bidang Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Dari pertemuan tersebut dan kunjungan lapangan terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan Komisi X DPR RI, dan tanggapan dari pemangku kepentingan, antara lain:

1. Pembangunan kota Pasuruan berdasarkan penjelasan walikota dan dinas terkait, bahwa pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekraf, olahraga, kepemudaan dan perpustakaan telah menunjukkan hasil positif. Selain itu, program-program pemerintah juga dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang ditemukan terutama dalam bidang pendidikan, yaitu mengenai rekrutmen guru ASN PPPK. Mengenai hal terakhir ini, tim kunjungan Komisi X menyampaikan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen guru ASN PPPK pada tahun 2024 di masa sidang yang akan datang. Hal ini mengingat permasalahan yang sama juga terjadi di beberapa daerah.

2. Dalam bidang pariwisata, Pemerintah Kota Pasuruan, melalui Walikotanya menyampaikan bahwa saat ini sedang fokus untuk membangun dan mengembangkan wisata religi dan wisata *heritage* (sejarah dan budaya). Hal ini dilakukan mengingat potensi yang ada di Kota Pasuruan, dengan adanya Makam Mbah Yai Hamid, salah satu ulama besar di tanah Jawa yang makamnya tidak pernah sepi dari para pengunjung untuk melakukan ziarah. Oleh karena itu, dalam upaya tersebut, Pemda Kota Pasuruan telah membangun payung madinah di kawasan Masjid Agung Al-anwar, dan saat ini sedang dalam proses membangun Taman Tematik, salah satunya dengan membangun tempat manasik haji terbesar. Mengenai hal tersebut, tim kunjungan Komisi X mendukung rencana pengembangan tersebut, namun perlu tetap dilakukan kajian mengenai fokus pengembangannya, termasuk memperhatikan market pengunjungnya. Pengembangan wisata religi di Kota Pasuruan diharapkan dapat menjadi episentrum kebermanfaatan bagi masyarakat, baik dalam hal peningkatan ekonomi, maupun persaudaraan lintas daerah karena diharapkan masyarakat yang datang ke Kota Pasuruan berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
3. Dalam bidang pariwisata, tim kunjungan kerja Komisi X menyampaikan bahwa saat ini Komisi X DPR RI sedang melakukan revisi UU Kepariwisata yang diarahkan antara lain untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan karena sangat potensial untuk memberikan kontribusi secara ekonomi, baik bagi pusat maupun daerah.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi masih belum maksimal, yakni di angka 14% dan perlu terus didorong agar setidaknya mencapai 20%. Beasiswa KIP Kuliah dengan anggaran kurang lebih Rp 20 triliun saat ini masih perlu ditingkatkan agar APK bisa terus naik dan menghasilkan talenta-talenta dengan kemampuan *high order thinking* untuk menghadapi industri 5.0.
5. Kota Pasuruan memiliki banyak bangunan bersejarah yang dapat menjadi modal untuk tidak hanya mengenal gedung tua saja, tetapi juga sejarah peninggalan yang ada. Banyak yang dapat digali, sehingga masyarakat lebih dapat menghargai sejarah. Sekolah perlu didorong untuk mendekati kepada konten lokal dan gemar membaca sejarah, sehingga tingkat literasi juga akan mengalami peningkatan.
6. Bangunan bersejarah di Kota Pasuruan banyak yang masih asli dan perlu dijadikan cagar budaya. Dengan menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai cagar budaya, pemerintah dapat mengembangkannya menjadi kawasan wisata. Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana penunjang. Perlu dorongan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar bisa lebih ditingkatkan.
7. Hasil kerajinan atau kriya Kota Pasuruan sudah baik, desain bagus, tidak mengandalkan desain lama, banyak kreasi baru dan pengerjaannya halus. Namun, hasil karya tersebut belum menjadi produk masif. Perlu dipikirkan supaya bisa menjadi produk masif dan menjadi ciri khas Kota Pasuruan.

Rantai sistem ekonomi kreatif perlu diperkuat sehingga mereka bisa berkembang dengan lebih baik.

8. Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas beberapa capaian Pemda Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan program-program pemerintah dalam bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan kepemudaan, dan perpustakaan. Sesuai kewenangannya yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakannya dengan baik. Adapun terhadap beberapa kendala dan permasalahan yang masih ditemui dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan kepemudaan, dan perpustakaan, tim kunjungan kerja akan menyampaikannya kepada pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data, permasalahan dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kota Pasuruan sesuai kewenangannya telah berjalan dengan baik. Di antara indikatornya adalah program-program dari Kemendikbudristek dapat dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan pada bidang ini yakni : (1) kendala kurangnya tenaga yang dikhususkan untuk peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) pada pendidikan khusus dan layanan khusus, (2) seleksi guru ASN PPPK secara keseluruhan belum menuntaskan guru honorer yang ada di masing-masing sekolah dan belum memenuhi kebutuhan guru, (3) ASN PPPK teknis yaitu tenaga administrasi (pranata komputer), tenaga perpustakaan (Pustakawan), pelaksana kebersihan dan penjaga sekolah sangat dibutuhkan di sekolah untuk menunjang kinerja pemerintah di bidang pendidikan, (4) pelaksanaan MBKM dan kerjasama DUDI tergantung dengan kondisi kampus, pendanaan menjadi salah satu tantangan tersendiri.

2. Bidang Kebudayaan.

Dalam bidang kebudayaan, Pemerintah kota Pasuruan telah melakukan upaya dan langkah-langkah pemajuan kebudayaan. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemajuan kebudayaan di Kota Pasuruan adalah (1) kurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya, (2) pengaruh budaya luar, (3) kurangnya SDM pelestari budaya, (4) kurangnya sumber informasi mengenai tradisi lokal di masyarakat, dan (5) perubahan kultur karena modernisasi. Dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan OPK, Pemkot Pasuruan menghadapi keterbatasan anggaran, belum ada sistem informasi

terpadu, kurangnya pelestari budaya lokal dan kurangnya minat masyarakat.

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam bidang pariwisata dan Ekraf, Pemerintah Kota Pasuruan saat ini sedang mengembangkan wisata religi dan wisata budaya. Terkait pengembangan ini, mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam hal anggaran dan juga menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja baru bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menyediakan bantuan pendanaan bagi pendampingan pengembangan pariwisata serta fasilitasi HAKI untuk pelaku ekonomi kreatif di daerah.

4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Mengenai bidang ini, Pemerintah Kota Pasuruan masih terus menerus melakukan program dan kegiatan seperti pembinaan atlet yang telah masuk Puslatda, meskipun memiliki keterbatasan anggaran. Adapun dalam bidang kepemudaan masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (a) kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, (b) kurangnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda karena apatisisme, (c) masih perlunya perhatian mengenai peran sosial pemuda, (d) sarana dan prasarana kepemudaan yang minim, dan (e) tingkat pengangguran terbuka pemuda. Sementara masalah kepramukaan yang dihadapi Kota Pasuruan adalah tidak adanya bumi perkemahan serta ketidakpastian kepengurusan Kwarda Jatim yang berimbas pada keorganisasian dan program Kwarcab.

5. Bidang Perpustakaan dan Literasi.

Mengenai bidang ini, penyelenggaraan perpustakaan secara umum berjalan baik, dan kondisi literasi di Kota Pasuruan tahun 2022 dari hasil penilaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebesar 67 (kategori tinggi). Adapun beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain terbatasnya jumlah koleksi bacaan di perpustakaan umum yakni hanya 12% dari jumlah penduduk, serta gangguan akses jaringan ke Perpustakaan RI. Selain itu, perpustakaan berbasis inklusi di Kota Pasuruan juga belum optimal.

B. Rekomendasi

Tim Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kota Pasuruan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI bersama KemenPANRB dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan mengenai kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, khususnya terkait rekrutmen guru dan tenaga pendidikan ASN PPPK.
2. Komisi X DPR RI mendesak Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan pemajuan 10 OPK di daerah dan menyosialisasikan hasil kongres Kebudayaan Indonesia 2023, terutama dengan 10 gagasan hasil kongres tersebut.

3. Komisi X DPR RI mendukung upaya dan langkah-langkah Pemda Kota Pasuruan untuk mengembangkan wisata religi dan wisata budaya, utamanya Pembangunan taman tematik Krampyangan.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mendukung pemerintah Kota Pasuruan untuk membangun fasilitas *youth center* dan bumi perkemahan guna menunjang pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.
5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI dan K/L lain terkait serta pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan literasi, di antaranya dengan mengatasi persoalan kurangnya bahan bacaan di perpustakaan daerah.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Pasuruan Jawa Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 16 Januari 2024

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd

Dr. Dede Yusuf M. E, ST., M.IPol.

A-539